



RENCANA KERJA PERUBAHAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI TAHUN 2022



PEMERINTAH
KOTA BEKASI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renja perubahan ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi setiap organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan Renja perubahan ini di uraikan rencana Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, dan Kegiatan. Selain itu, juga dijelaskan tentang Akuntabilitas Kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik target Renja pada 2 (dua) tahun sebelumnya dan prediksi tahun yang akan datang. Renja ini berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan maupun kegagalan Instansi Pemerintah dalam menjalankan tujuan pokok dan fungsinya.

Kami menyadari, tiada suatu karya manusia yang sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran, pendapat, dan kritik demi penyempurnaan Renja untuk masa yang akan datang. Akhirnya, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyempurnaan Renja ini.

Bekasi, 2022
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA BEKASI



CECEP SUHERLAN, SE
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19630328 198503 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	8
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II	10
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN LALU ...	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesbangpol	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bekasi	18
2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	36
BAB III	39
TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESBANGPOL KOTA BEKASI	39
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol	43
3.3 Program dan Kegiatan	45
BAB IV	62
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2022	62
BAB V	68
PENUTUP	68
A. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	68
B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	68
C. Rencana Tindak Lanjut	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2020	14
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja SKPD pada Tahun 2020	20
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020	26
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan	36
Tabel 3.1	Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol Kota Bekasi Berdasarkan Sasaran Renstra K/L dan Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Dalam Pelayanan	40
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	53
Tabel 4.1	Rencana Kerja Perubahan (Program, Kegiatan, Indikator Program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif)	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi dalam menyusun Renja sangat memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol periode 2018-2023. Adapun Kepala Daerah Kota Bekasi terpilih periode 2018-2023 adalah **“Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan”**. Dari visi tersebut kemudian diturunkan ke dalam 5 (lima) misi Kepala Daerah terpilih yaitu:

- 1) Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
- 2) Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
- 3) Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
- 4) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
- 5) Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Dari ke-5 misi tersebut, Badan Kesbangpol sangat terkait erat dengan misi ke-5. Tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Bekasi memberikan penugasan untuk memberikan pelayanan publik yang terkandung di dalam misi ke-5 Kepala Daerah terpilih.

Misi 5 Kepala Daerah tersebut kemudian dijabarkan ke dalam bentuk tujuan-tujuan pembangunan daerah, yang beberapa diantaranya adalah sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Tujuan yang dimaksud adalah **“Mewujudkan Kota Bekasi yang Tertib dan Aman”**.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah tersebut, Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol disusun. Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol merupakan salah satu alat di dalam menjalankan roda pemerintahan pada Badan Kesbangpol. Renja ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di dalam melakukan perencanaan dan keuangan pembangunan. Renja ini berfungsi sebagai panduan (*Guidance*) tahunan di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang bersifat urusan (langsung) pada Badan Kesbangpol.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan di dalam penyusunan Renja Badan Kesbangpol adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Badan Kesbangpol sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah (Lemtekda) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi juga mengacu kepada perundang-undangan tersebut.

Dalam melakukan penyusunan Renja, Badan Kesbangpol selalu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait yang memiliki kompetensi di dalam mendukung penyusunan renja ini. Proses penyusunan ini Renja ini dimulai dengan mengajukan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah pada tahun 2022 kepada Bappelitbangdaa Kota Bekasi sebagai operator utama perencanaan pembangunan daerah. Program dan kegiatan yang diajukan oleh Badan Kesbangpol merujuk kepada RPJMD Kota Bekasi 2018-2023, Renstra Perubahan Badan Kesbangpol 2021-2023, usulan-usulan kecamatan yang dijaring melalui Musrenbang tingkat kecamatan serta masukan dari Forum Perencanaan Tingkat Perangkat Daerah.

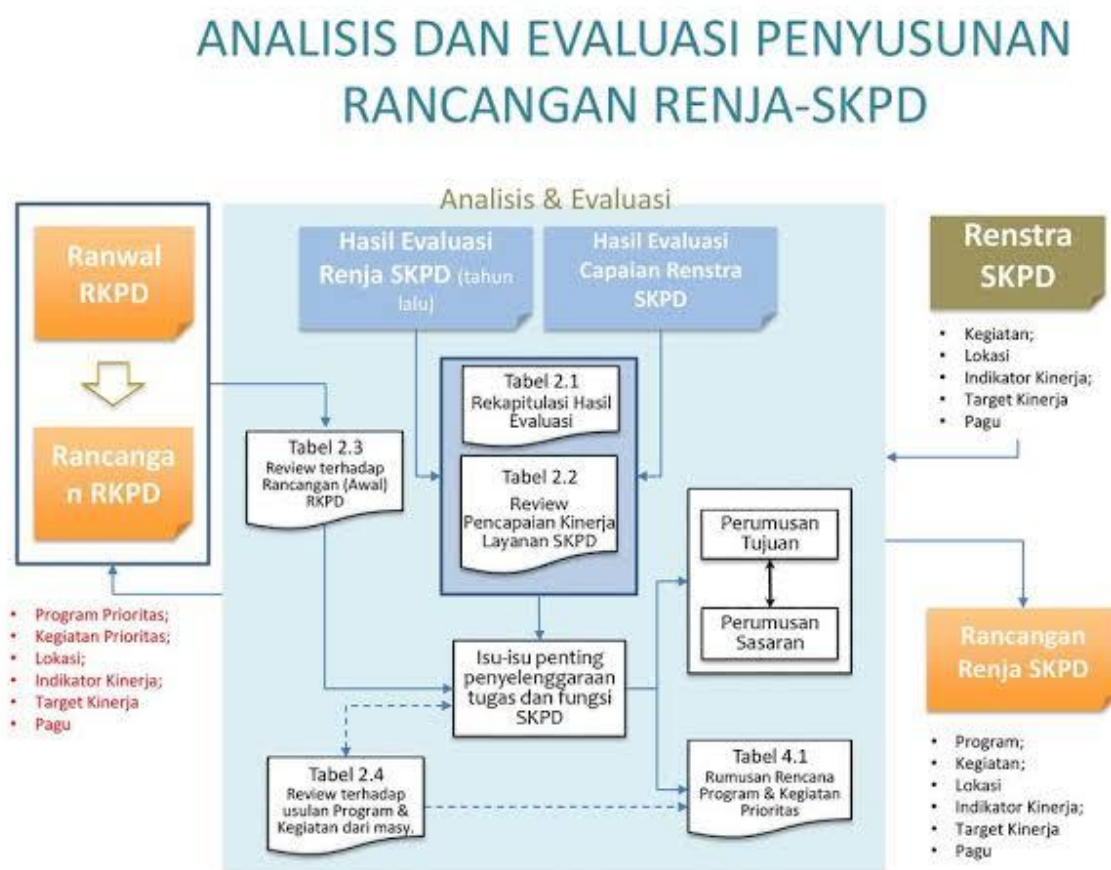
Rencana Kerja Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Perubahan SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja Perubahan SKPD.
2. Tahap penyajian rancangan Renja Perubahan SKPD.

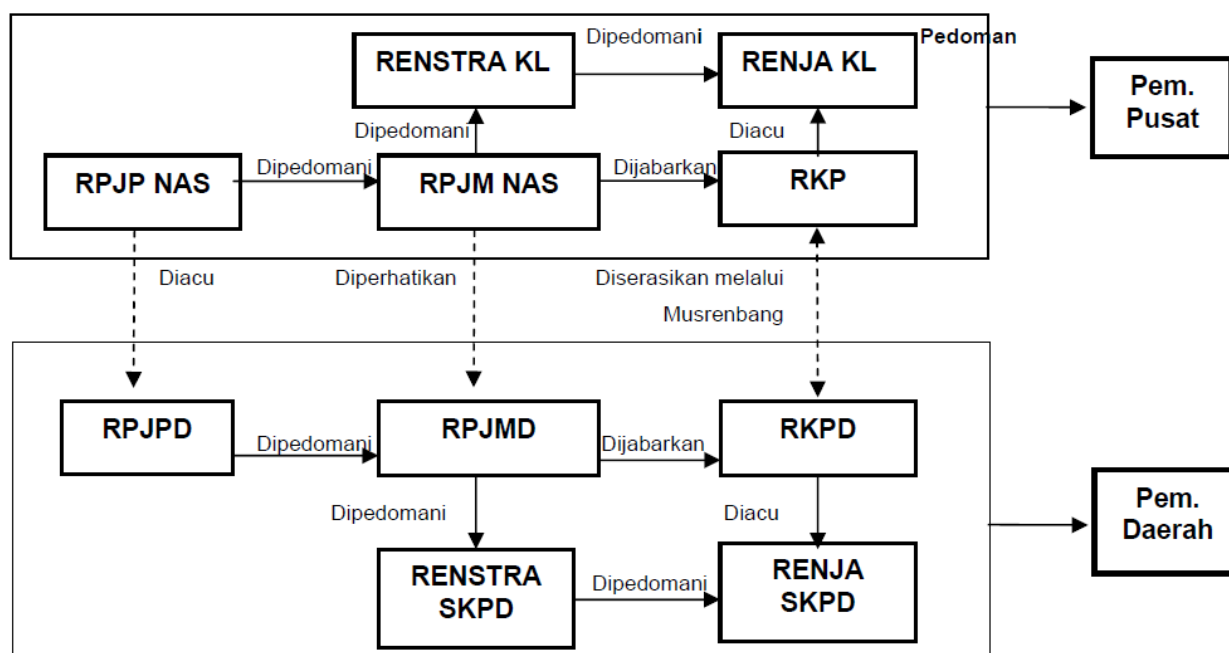
Rencana Kerja Perubahan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perubahan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kota Bekasi Tahun 2022. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja

Perubahan Kesbangpol Kota Bekasi, selaras dengan Renstra Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Selanjutnya Renja Perubahan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2022 dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan RKPD Kota Bekasi Tahun 2022 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Gambar 1.1 Keterkaitan Renja PD dengan RKPD



Pada Renja ini juga akan dijelaskan terkait prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat yang memiliki keterkaitan dengan urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan politik. Salah satu prioritas pembangunan kesatuan bangsa dan politik Provinsi Jawa Barat adalah pengutan fungsi deteksi dini di wilayah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Oleh karena itu, Badan Kesbangpol Kota Bekasi dapat melakukan peningkatan kapasitas fungsi deteksi dini di Kota Bekasi melalui kerjasama deteksi dini dengan Provinsi Jawa Barat.

Gambar 1.2 Keterkaitan Renja PD dengan Renja PD Prov

Langkah yang dapat dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi terkait peningkatan kapasitas deteksi dini di wilayah Kota Bekasi adalah dengan melakukan kolaborasi kinerja fisik dengan Provinsi Jawa Barat. Kolaborasi kegiatan dapat dilakukan dengan pembagian data pantau wilayah dan pemetaan wilayah rawan konflik.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunannya, Renja Badan Kesbangpol Tahun 2022 didasarkan kepada :

1. Landasan Ideologi Pancasila;
2. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945;
Landasan operasional, terdiri dari :
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 – 441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Seri D);
21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi yang telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;

22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 18 Seri E);
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27.A Tahun 2019 Tentang Tata Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 27.A Seri E);
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 82 Seri E).
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 129 Seri D).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Perubahan Badan Kesbangpol disusun dengan maksud untuk memberikan panduan dan arah bagi aparatur Badan Kesbangpol dalam melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan Badan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran. Renja Perubahan Badan Kesbangpol ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check and balances*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh aparatur Badan Kesbangpol. Renja perubahan ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan yang dijalankan Badan Kesbangpol sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Bekasi. Adapun tujuan dari Renja Perubahan Badan Kesbangpol, adalah:

- a. Merumuskan arah pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesbangpol dalam jangka tahun 2022 agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan efektif dan efisien;
- b. Meletakkan fondasi dan fokus tujuan pelaksanaan kegiatan yang hendak dicapai dalam tahun 2022;
- c. Menetapkan pedoman (input, output dan outcome) dalam melaksanakan kegiatan tahunan Badan Kesbangpol;
- d. Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir dari organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesbangpol Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. BAB I adalah PENDAHULUAN. Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kota Bekasi;
2. BAB II adalah EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KESBANGPOL TAHUN 2020. Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program serta kegiatan masyarakat;

3. BAB III adalah TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional terkait bidang kerja Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah.
4. BAB IV adalah RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
5. BAB V adalah PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesbangpol

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil proses evaluasi dapat teridentifikasi paling tidak dua hal, yaitu sejauhmana keberhasilan proses perencanaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tahun 2018-2023 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Badan Kesbangpol untuk melaksanakan pembangunan di Kota Bekasi.

Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Bekasi pada dasarnya bermuara dari visi yang telah digariskan oleh Wali Kota terpilih. Visi Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan menjadi landasan konseptual di dalam melakukan perencanaan pembangunan, termasuk perencanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Perencanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran. Indikator tersebut antara lain:

1. Nilai AKIP Badan Kesbangpol Kota Bekasi.
2. Persentase Kasus Perselisihan Antar Umat Beragama yang Diselesaikan;
3. Persentase Kasus Perselisihan Suku Bangsa, Ras, dan Antar Golongan yang Diselesaikan;

Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan dalam proses perumusan Renja Badan Kesbangpol adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik secara menyeluruh yang dikaitkan dengan kedua komponen indikator sasaran tersebut.

Kondisi daerah Kota Bekasi terkait dengan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat dari indikator sasaran sebagai berikut:

1. Persentase Kasus Perselisihan Antar Umat Beragama Yang Diselesaikan.

Salah satu misi pembangunan Walikota yang dibebankan ke dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah misi ke-4, yaitu **“Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif”**. Misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam indikator sasaran Badan Kesbangpol Kota Bekasi sebagaimana yang tertera di dalam sub judul. Salah satu upaya untuk menekan angka jumlah kasus keagamaan yang muncul adalah dengan menurunkan jumlah gangguan Kantrantibmas dan Pelanggaran Ketertiban di Kota Bekasi. Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator sasaran tersebut adalah dengan **“Peningkatan kesatuan bangsa dengan pemantapan ideologi nasional, Pembauran Kebangsaan, dan Pemantapan Kerukunan Umat Beragama**. Pada tahun 2020, indikator ini menetapkan target Persentase Penyelesaian Masalah Keagamaan yang terjadi di Kota Bekasi. Indikator ini menargetkan bahwa kejadian masalah keagamaan yang terjadi di Kota Bekasi harus diselesaikan 100%.

2. Persentase Kasus Perselisihan Suku Bangsa, Ras dan Antar Golongan yang Diselesaikan.

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan damai juga perlu dikembangkan dari sisi peningkatan kondusifitas di masyarakat. Terkait hal tersebut Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan politik ini sangat diperlukan demi terciptanya iklim masyarakat yang kondusif, santun dan beretika dalam mendukung stabilitas dan keberlangsungan roda pemerintahan dan kehidupan sosial di Kota Bekasi. Dengan adanya pendidikan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik, masyarakat Kota Bekasi akan mengalami peningkatan kesadaran dan kesantunan di dalam berpolitik. Kesadaran dan kesantunan di dalam berpolitik dari masyarakat akan berimplikasi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat di Pemilu.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020, pelaksanaan kinerja Badan Kesbangpol Kota Bekasi ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung Perangkat Daerah, dengan ruang lingkup kinerjanya sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung Badan Kesbangpol Kota Bekasi dianggarkan sebesar Rp. 8.843.187.000 (Gaji, Tunjangan Daerah, dan Tunjangan Pegawai Berbasis Kinerja SKPD) dan sampai dengan Bulan Desember 2020 terealisasi sebesar Rp 7.379.377.976 (83,44%).

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung Badan Kesbangpol Kota Bekasi dianggarkan sebesar Rp. 3.465.700.000 (yang terdiri dari **Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) dan Belanja Langsung Urusan (BLU)** dan sampai dengan Bulan Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 1.994.136.419 (57,54%). Adapun perincian Belanja Langsung Urusan (BLU) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

✓ **Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)**

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini pada Tahun 2020 mencapai realisasi kinerja sebesar 87,50 % dan realisasi anggaran sebesar 74,82%. Pada program ini, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 5) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
- 6) Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran;
- 7) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan;
- 8) Penataan Arsip.

Sebagian besar realisasi kegiatan pada program ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini pada Tahun 2020 mencapai realisasi kinerja sebesar 80% dan realisasi anggaran sebesar 37,11%. Pada program ini, kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini pada Tahun 2020 mencapai realisasi kinerja sebesar 0% dan realisasi anggaran sebesar 0%. Pada program ini, kegiatan yang dilaksanakan antara lain ;

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal;

3. Belanja Langsung Urusan SKPD

a) Program Pengelolaan Pemerintahan Umum

Program ini pada Tahun 2020 mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 60,50%. Pada program ini, kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Pendidikan Politik Bagi Masyarakat;
- 2) Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional;
- 3) Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah; dan

Sampai dengan Bulan Desember 2020, kegiatan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat T.A. 2020 realisasi mencapai 100% dengan realisasi anggaran sebesar 22,96%. Adapun Kegiatan Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah, realisasi kinerja telah mencapai 100% dengan serapan anggaran sebesar 91,2%%.

Selain pelaksanaan kegiatan yang telah dijelaskan di atas, kegiatan lain yang berada di program ini telah tidak terlaksana dikarenakan anggaran dihilangkan dalam anggaran perubahan.

b) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program ini pada Tahun 2020 mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 40,3%. Pada program ini, kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Pembinaan Bela Negara;
- 2) Penyelenggaraan Sinergitas Tokoh Masyarakat Dengan Pemerintah Daerah;

Sampai dengan Bulan Desember 2020, kegiatan Pembinaan Bela Negara T.A. 2020 realisasi mencapai 100% dengan realisasi anggaran sebesar 25,81%. Adapun Kegiatan Penyelenggaraan Sinergitas Tokoh Masyarakat Dengan Pemerintah Daerah, realisasi kinerja telah mencapai 100% dengan serapan anggaran sebesar 57.92%%.

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2020
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kota Bekasi**

Kode	UrusanBidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4.01 . 4.01.05 . 33	Program Pengelolaan Pemerintahan Umum										
4.01 . 4.01.05 . 33 . 04	Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah	Jumlah pantauan kewaspadaan dini daerah	1.150 Pantauan	200 Pantauan	200 Pantauan	200 Pantauan	100%	200 Pantauan	600 Pantauan	57.17%	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 03	Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional	Jumlah sub kegiatan	12 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	0	0%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	16.66%	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 01	Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	Jumlah peserta pendidikan politik	600 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	300 Orang	50.00%	
4.01 . 4.01.05 . 01	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan										
4.01 . 4.01.05 . 24 . 01	Pembinaan Bela Negara	Jumlah peserta workshop bela negara	800 Orang	0 Orang	100 Orang	0	0%	150 Orang	150 Orang	18.75%	
4.01 . 4.01.05 . 24 . 02	Sinergitas Tokoh Masyarakat dengan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan sinergitas masyarakat dengan Pemda	12 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	33.33%	

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya: - Alat tulis kantor: 84 Bulan	Tersedianya: - Alat tulis kantor: 12 Bulan	Tersedianya: - Alat tulis kantor: 12 Bulan	Tersedianya: - Alat tulis kantor: 12 Bulan	100%	Tersedianya: - Alat tulis kantor: 12 Bulan	Tersedianya: - Alat tulis kantor: 36 Bulan	42,85%	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya layanan cetakan dan penggandaan	Terbiayainya : - Barang cetak: 100 jenis barang - fotocopy: 382.775 lembar; - Penjilidan 403 Buku	Terbiayainya: - Barang cetak: 16 jenis barang - fotocopy: 74.685 lembar; - Penjilidan: 43 Buku	Terbiayainya: - Barang cetak: 15 jenis barang - fotocopy: 102.745 lembar; - Penjilidan: 50 Buku	Terbiayainya: - Barang cetak: 15 jenis barang - fotocopy: 102.745 lembar; - Penjilidan: 50 Buku	100%	Terbiayainya: - Barang cetak: 12 jenis barang - fotocopy: 105.315 lembar; - Penjilidan: 75 Buku	Terbiayainya: - Barang cetak: 43 jenis barang - fotocopy: 282.745 lembar; - Penjilidan: 168 Buku	73,82%	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya: - Koran: 18.500 exemplar; - Buku peraturan perundangan : 10 buku	Tersedianya: - Koran: 2300 exemplar; - Buku peraturan perundangan : 2 buku	Tersedianya: - Koran: 2300 exemplar; - Buku peraturan perundangan : 0 buku	Tersedianya: - Koran: 2500 exemplar; - Buku peraturan perundangan : 0 buku	100%	Tersedianya: - Koran: 2500 exemplar; - Buku peraturan perundangan : 0 buku	Tersedianya: - Koran: 7300 exemplar; - Buku peraturan perundangan : 2 buku	39,44%	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Tersedianya: - Air mineral gallon : 3362 galon; - Gula : 1104 kg;	Tersedianya: - Air mineral gallon : 450 galon;	Tersedianya: - Air mineral gallon : 456 galon;	Tersedianya: - Air mineral gallon : 456 galon;	100%	Tersedianya: - Air mineral gallon : 456 galon; - Gula : 135 kg; - Kopi: 141 boks; - Teh: 123 pak;	Tersedianya: - Air mineral gallon : 1362 galon; - Gula : 384 kg;	38,68%	

Kode	UrusanBidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
			- Kopi: 889 boks; - Teh: 883 pak; - Kue kering toples: 712 kg; - Snack: 6260 dus; - Makan: 6267 box	- Gula : 135 kg; - Kopi: 95 boks; - Teh: 150 pak; - Kue kering toples: 100 kg; - Snack: 775 dus; - Makan: 725 box	- Gula : 114 kg; - Kopi: 89 boks; - Teh: 90 pak; - Kue kering toples: 102 kg; - Snack: 775 dus; - Makan: 600 box	- Gula : 114 kg; - Kopi: 89 boks; - Teh: 90 pak; - Kue kering toples: 102 kg; - Snack: 775 dus; - Makan: 600 box		- Kue kering toples: 140 kg; - Snack: 942 dus; - Makan: 942 box	- Kopi: 325 boks; - Teh: 363 pak; - Kue kering toples: 342 kg; - Snack: 2492 dus; - Makan: 2267 box		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1280 kali perjalanan dinas	160 kali perjalanan dinas	160 kali perjalanan dinas	160 kali perjalanan dinas	100%	160 kali perjalanan dinas	480 kali perjalanan dinas	37,50%	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya honor Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	Terbiayainya: - Honor TKK : 60 bulan;	Terbiayainya: - Honor TKK : 12 bulan;	Terbiayainya: - Honor TKK : 12 bulan;	Terbiayainya: - Honor TKK : 12 bulan;	100%	Terbiayainya: - Honor TKK : 12 bulan;	Terbiayainya: - Honor TKK : 36 orang;	60%	
4.01 . 4.01.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Terpelihara - Pemeliharaan mobil: 9 unit;	Terpeliharaan ya:	Terpeliharanya a:	Terpeliharaan ya:	88,98%	Terpeliharanya: - Pemeliharaan mobil: 9 unit;	Terpeliharanya: - Pemeliharaan mobil: 9 unit;	73,68%	

Kode	UrusanBidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
			- Pemeliharaan motor: 10 unit	- Pemeliharaan mobil: 8 unit; - Pemeliharaan motor: 5 unit	- Pemeliharaan mobil: 8 unit; - Pemeliharaan motor: 5 unit	- Pemeliharaan mobil: 8 unit; - Pemeliharaan motor: 5 unit		- Pemeliharaan motor: 5 unit	- Pemeliharaan motor: 5 unit		
4.01 . 4.01.05 . 02 . 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Terpelihara - Mesin Tik: 7 Unit; - Service AC: 13 Unit; - Komputer: 25 Unit; - Printer: 16 Unit; - Handly Talky: 12 Unit	Terpeliharaan - Mesin Tik: 7 Unit; - Service AC: 13 Unit; - Komputer: 17 Unit; - Printer: 12 Unit	Terpeliharanya - Mesin Tik: 7 Unit; - Service AC: 13 Unit; - Komputer: 17 Unit; - Printer: 12 Unit; - Handly Talky: 6 Unit	Terpeliharaan - Mesin Tik: 7 Unit; - Service AC: 13 Unit; - Komputer : 17 Unit; - Printer: 12 Unit; - Handly Talky: 6 Unit	100%	Terpeliharanya: - Mesin Tik: 7 Unit; - Service AC: 13 Unit; - Komputer: 17 Unit; - Printer: 12 Unit; - Handly Talky: 6 Unit	Terpeliharanya: - Mesin Tik: 7 Unit; - Service AC: 13 Unit; - Komputer: 17 Unit; - Printer: 12 Unit; - Handly Talky: 6 Unit	75,34%	
4.01 . 4.01.05 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
4.01 . 4.01.05 . 05 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya biaya pendidikan dan pelatihan formal	60 Orang	0 Orang	10 Orang	0 Orang	0 %	0 Orang	0 Orang	0 %	

Berdasarkan penjelasan tabel di atas Badan Kesbangpol telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja program dan kegiatan yang ada di Badan Kesbangpol. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol adalah dengan melakukan rasionalisasi anggaran badan. Melalui rasionalisasi tersebut Badan Kesbangpol dapat membantu pemerintah Kota Bekasi di dalam melakukan penghematan tanpa melakukan pengurangan standar kinerja badan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bekasi

Keberhasilan penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat melalui sinergi perencanaan Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat nasional dengan perencanaan yang berada di level daerah. Untuk mendukung hal tersebut, Badan Kesbangpol Kota Bekasi telah melakukan penyesuaian pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah. Seluruh dasar hukum pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bekasi mengacu/mengadopsi dasar hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Saat ini, produk layanan yang diberikan Badan Kesbangpol Kota Bekasi kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)/Surat Tanda Laporan Keberadaan kepada Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas) yang berdomisili di Kota Bekasi. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) merupakan produk hukum Badan Kesbangpol Kota Bekasi yang diadopsi dari UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas. Penerbitan SKT ini berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Kemasyarakatan;
- 2) Penerbitan Surat Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah kepada Panitia Pendirian Rumah Ibadah. Surat pertimbangan ini merupakan produk hukum yang disadur dari Peraturan Bersamaan Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri serta peraturan-peraturan tentang kerukunan umat beragama. Penerbitan Surat Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah ini berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Kerukunan Umat Beragama;
- 3) Pelaksanaan giat kerukunan umat beragama melalui kegiatan seminar, sosialisasi dan Focus Group Discussion pada Subbid Kerukunan Umat Beragama;

- 4) Pelaksanaan Pendidikan Politik untuk masyarakat pemula, tokoh masyarakat, tokoh agama, partai politik dan anggota Orkemas. Kegiatan ini dilaksanakan pada Bidang Politik Dalam Negeri;
- 5) Pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan untuk masyarakat pemula, tokoh masyarakat, tokoh agama, partai politik dan anggota Orkemas. Kegiatan ini dilaksanakan pada Bidang Kesatuan Bangsa;
- 6) Pelaksanaan verifikasi bantuan hibah kepada Forum/Organisasi bentukan pemerintah dan Orkemas untuk mendapatkan rekomendasi bantuan hibah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Subbid Kemasyarakatan;
- 7) Pelaksanaan verifikasi bantuan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bekasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada Subbid Hubungan Antar Lembaga;
- 8) Pelaksanaan giat deteksi dini yang bertujuan untuk memantau perkembangan kantrantibmas dan kerawanan sosial-politik di masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada bidang Kewaspadaan Nasional;
- 9) Pelaksanaan fasilitasi forum Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA). Kegiatan ini dilaksanakan pada bidang Kewaspadaan Nasional.

Selain itu, pelayanan Badan Kesbangpol kepada masyarakat juga dilakukan ke dalam bentuk pelaksanaan belanja urusan. Belanja urusan ini berupa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tupoksi yang dilaksanakan pada Badan Kesbangpol. Pada Tahun 2020 belanja urusan Badan Kesbangpol sebagian besar telah mencapai target yang telah ditetapkan. Akan tetapi di dalam pelaksanaan terdapat beberapa kendala. Kendala yang dihadapi Badan dalam melaksanakan kegiatan urusan antara lain:

- 1) Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kuantitas maupun kualitas, dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol;
- 2) Jumlah SDM Badan Kesbangpol yang telah memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa masih sedikit. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia/Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa;
- 3) Masih adanya *misedlink* capaian yang digariskan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap capaian yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja SKPD Pada Tahun 2020

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2022	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)
1	Persentase Kasus Perselisihan Antar Umat Beragama yang Diselesaikan - Rumus : $\frac{\text{Jumlah laporan kasus yang ditangani}}{\text{Jumlah laporan kasus}} \times 100$	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
2	Persentase Kasus Perselisihan Suku Bangsa, Ras dan Antar Golongan yang Diselesaikan - Rumus : $\frac{\text{Jumlah laporan kasus yang ditangani}}{\text{Jumlah laporan kasus}} \times 100$	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
3	Nilai AKIP Kesbangpol (Hasil Evaluasi SAKIP PD dari Inspektorat)	-	-	Cc	Cc	B	B	B	Bb	Bb	-	Bb	Bb	

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi merupakan lembaga teknis daerah Kota Bekasi yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesbangpol mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 4) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kesbangpol menghadapi berbagai isu/permasalahan sosial di masyarakat. Isu-isu di dalam penyelenggaraan tugas yang dihadapi Badan Kesbangpol, antara lain:

1) Isu Kerukunan Umat Beragama

Terdapat beberapa permasalahan di dalam penanganan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi. Rumusan isu kerukunan umat beragama, antara lain:

- **Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata-cara pendirian rumah ibadah di Kota Bekasi.**

Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, terdapat beberapa kasus sosial muncul ke permukaan yang disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata-cara pendirian rumah ibadah. Kasus tersebut antara lain kerawanan sosial yang muncul akibat pendirian Rumah Ibadah salah satu contoh kasus yaitu terkait Ijin Pendirian Rumah Ibadah Gereja Santa Clara di wilayah Kec. Bekasi Utara. Upaya yang telah dilakukan Badan Kesbangpol terkait permasalahan ini adalah melakukan pendekatan persuasif diantara kedua belah pihak yang berselisih. Badan Kesbangpol juga memberikan kesempatan kepada 2 (dua) pihak yang berselisih untuk beraudensi dengan unsur muspida. Upaya lain yang dilakukan Badan Kesbangpol dengan melakukan sosialisasi Peraturan Tata-Cara Pendirian Rumah Ibadah secara masif. Badan

Kesbangpol juga melakukan verifikasi dan survei terkait berkas pengajuan pendirian rumah ibadah.

- **Berkembangnya Paham Radikal Keagamaan.**

Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, Kasus lain yang muncul ke permukaan adalah berkembangnya pemahaman radikal dalam beragama. Pemahaman ini berkembang menjadi sebuah gerakan-gerakan yang dapat mengganggu stabilitas pembangunan di Kota Bekasi. Badan Kesbangpol bersama *stakeholder* tetap mewaspadaikan penyebaran paham Radikal di masyarakat, terlebih dengan kembalinya para *combatan* dari medan *Jihad* di Suriah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Intelijen Nasional, diperkirakan jumlah *combatan* yang kembali dari medan *Jihad* hampir 200 orang. Sebagian besar dari *combatan* tersebut berdomisili di wilayah Jabodetabek.

Terkait hal tersebut, Badan Kesbangpol bersama unsur terkait giat melakukan pendekatan dan penggalangan. Badan Kesbangpol bersama Kominda Kota Bekasi juga melakukan upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap kemungkinan penyebaran paham radikal yang berkembang di masyarakat. Selain itu, Badan Kesbangpol Kota Bekasi bersama MUI, Kantor Kemenag, FKUB dan FPK terus melakukan pendampingan kepada pengurus DKM, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam hal pencegahan paham radikal di wilayah.

Upaya lain yang dilakukan Badan Kesbangpol adalah melakukan tindakan preventif. Upaya preventif yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Kesbangpol Kota Bekasi adalah dengan mengadakan dialog mendalam diantara pemuka agama. Badan Kesbangpol juga memperkuat peran dan fungsi dari forum bentukan pemerintah yang memiliki hubungan kerja di dalam kerukunan umat beragama, dalam hal ini FKUB dan FPK. Secara umum, kasus kerukunan umat beragama yang terjadi di Kota Bekasi disebabkan karena faktor pendirian rumah ibadah, penistaan ajaran agama dari kelompok tertentu dan perselisihan yang terjadi di internal pengurus rumah ibadah.

2) Isu Keamanan dan Ketertiban

Masalah-masalah sosial yang muncul di Kota Bekasi disebabkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dampaknya, kaum urban yang menjadi pengangguran menjadi beban ekonomi dan beban sosial yang berat bagi masyarakat dan pemerintah. Besarnya pengangguran akan meningkatkan kerawanan sosial di Kota Bekasi. Rumusan isu keamanan dan ketertiban antara lain:

**TABEL PERMASALAHAN KERAWANAN SOSIAL DI KOTA BEKASI
TAHUN 2020**

No.	Wilayah Titik Rawan	Permasalahan
1	2	3
1.	Kecamatan Bekasi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penataan lahan parkir dan pkl sehingga sering dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu; • Permasalahan penyakit masyarakat (prostitusi dibalut dengan kegiatan kafe).
2.	Kecamatan Bekasi Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Pendirian rumah ibadah (Gereja) Santa Clara terdapat penolakan dari beberapa kelompok masyarakat. Penolakan dimotori oleh Ponpes An-Nur dan Ponpes At-Taqwa; • Perkembangan paham radikal di Masjid Al-Hikmah Duren Jaya.
3.	Kecamatan Bekasi Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan penataan PKL di Jalan M. Yamin; • Ditemukannya tempat transit teroris; • Maraknya aktifitas Organisasi Masyarakat di luar koridor hukum.
4.	Kecamatan Bekasi Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Sengketa lahan terkait pembebasan lahan untuk pembangunan ruas jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becak Kayu).
5.	Kecamatan Medan Satria	<ul style="list-style-type: none"> • Monopoli lahan parkir pasar family yang dilakukan oleh oknum Ormas; • Ditemukannya tempat transit terduga teroris.
6.	Kecamatan Rawalumbu	<ul style="list-style-type: none"> • Terindikasi aktifitas aliran syiah di pemukiman warga; • Permasalahan izin rumah ibadah HKBP Rawalumbu; • Permasalahan warung remang-remang di daerah cipendawa.
7.	Kecamatan Jatiasih	<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan peredaran narkoba (ditemukan tempat transit ganja); • Ditemukan lokasi home industri narkoba jenis sabu.
8.	Kecamatan Pondok Gede	<ul style="list-style-type: none"> • Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Masjid Al-Misbah Pondok Gede; • Permasalahan PKL di pasar Pondok Gede.
9.	Kecamatan Jatisampurna	<ul style="list-style-type: none"> • Ditemukan home industry senjata api illegal; • Permasalahan kafe remang-remang.
10	Kecamatan Pondok Melati	<ul style="list-style-type: none"> • Ditemukan tenaga kerja asing illegal di rumah pendidikan.

No.	Wilayah Titik Rawan	Permasalahan
1	2	3
11.	Kecamatan Bantargebang	• Permasalahan pengelolaan sampah antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Permasalahan ini melibatkan masyarakat di sekitar tempat pengelolaan sampah bantar gebang.
12.	Kecamatan Mustika Jaya	• Ditemukan tempat transit teroris.

(Sumber : Bidang Kewaspadaan Nasional)

Untuk menyikapi hal tersebut, Badan Kesbangpol memaksimalkan pemantauan wilayah terkait deteksi dini terhadap sumbu-sumbu yang dapat memicu kerawanan sosial di Kota Bekasi. Badan Kesbangpol melakukan giat deteksi dini dan pendidikan Intelejen Daerah kepada pengurus forum bentukan pemerintah di bidang kewaspadaan serta jaring intelejen di tingkat Kelurahan.

Oleh karenanya, penguatan fungsi dan peran dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) menjadi penting. Keberadaan Kominda dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kota Bekasi diharapkan dapat atau mampu mencari, mengumpulkan dan menganalisa informasi di lingkungan/wilayah kerja masing-masing dalam menunjang stabilitas keamanan dan menekan tingkat kerawanan sosial di Kota Bekasi. Diharapkan pula tanggungjawab aparat kelurahan, kecamatan dan masyarakat dalam melaksanakan fungsi sebagai jaring Deteksi Dini.

Berdasarkan analisa dan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan skala prioritas (pembobotan) Badan Kesbangpol dapat ditekankan kepada :

1) **Program**

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pengelolaan Pemerintahan Umum memiliki posisi penting dalam menyelesaikan isu-isu kritis urusan kesatuan bangsa dan politik. Kedua program tersebut menjadi wadah untuk kegiatan-kegiatan yang terfokus kepada pembangunan wawasan kebangsaan dan pemerintahan umum di Kota Bekasi.

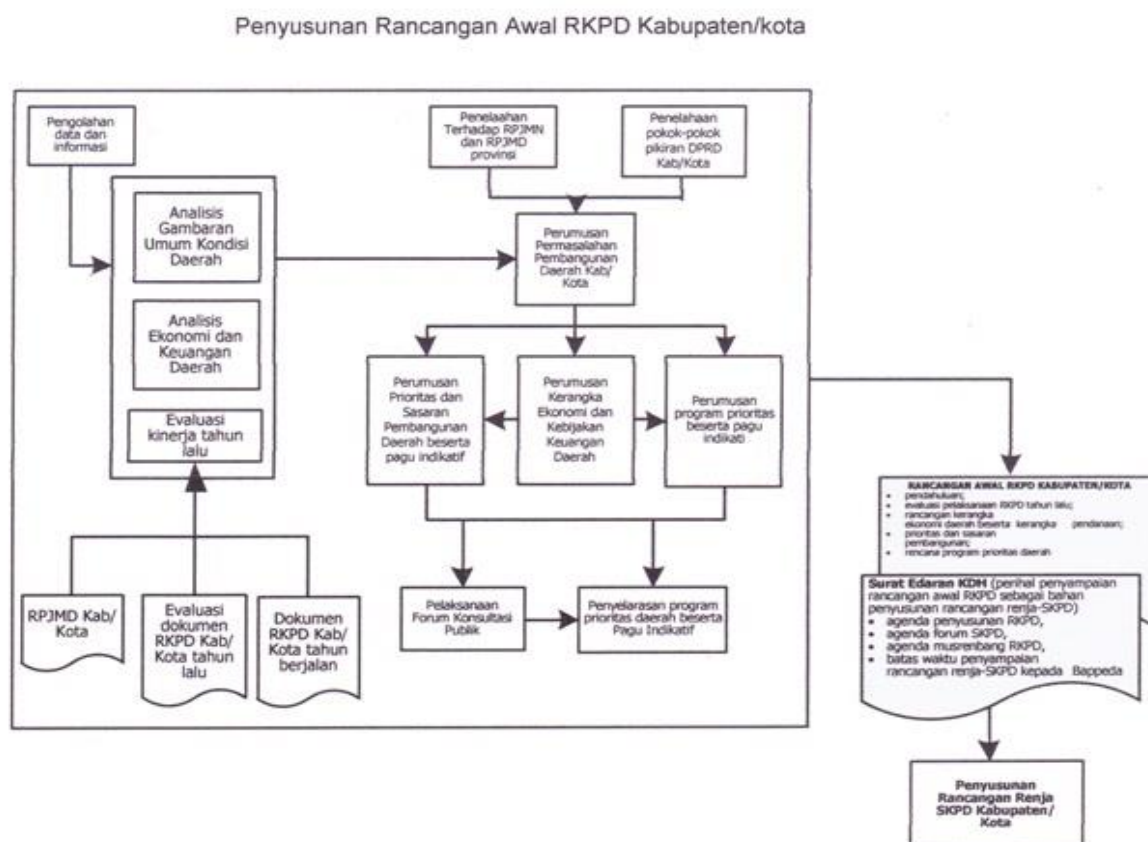
2) **Kegiatan**

Kegiatan Deteksi Dini di Daerah, Pelaksanaan Bela Negara dan Sinergitas Antara Tokoh Masyarakat dengan Pemerintahan Daerah termasuk ke dalam skala prioritas Badan Kesbangpol untuk menyelesaikan isu-isu strategis seperti yang telah dijelaskan di atas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk perencanaan yang baik. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Berikut kami sampaikan rancangan awal RKPD terkait usulan program dan kegiatan Badan Kesbangpol hasil penyesuaian dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Gambar 2.1 Alur Rancangan Awal RKPD dan Renja PD



Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SKPD	1. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	11,303,184,800	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SKPD	1. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	10,846,646,330	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Terpenuhinya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	30,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Terpenuhinya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	15,000,0000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah Laporan	1 Laporan	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah Laporan	1 Laporan	15,000,000	Sesuai hasil Desk pagu indikatif menjadi 15.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SKPD	Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah	100%	9,110,856,800	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SKPD	Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah	100%	9,090,250,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Pembayaran gaji, tunjangan dan premi BPJS ASN	12 Bulan	9,080,856,800	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Pembayaran gaji, tunjangan dan premi BPJS ASN	12 Bulan	9,080,856,800	Sesuai hasil Desk pagu indikatif menjadi 9,090,250,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD	Jumlah Laporan	1 Laporan	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD	Jumlah Laporan	1 Laporan	10,000,000	Sesuai hasil Desk pagu indikatif menjadi 10,000,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SKPD	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	310,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SKPD	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	330,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	SKPD	- Jumlah pakaian olah raga - Jumlah sepatu olah raga	60 Stell 60 Stell	150,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	SKPD	- Jumlah pakaian olah raga - Jumlah sepatu olah raga	60 Stell 60 Stell	-	Kegiatan ditiadakan (hasil desk)
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SKPD	Tersedianya biaya pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	30,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SKPD	Tersedianya biaya pendidikan dan pelatihan formal	12 Orang	30,000,000	Sesuai hasil Desk penyesuaian target capaian
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	100,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	37 Orang	100,000,000	Sesuai hasil Desk penyesuaian target capaian
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	30,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	200,000,000	Sesuai hasil Desk pagu indikatif menjadi 200,000,000 dan penyesuaian target capaian
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	SKPD	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	819,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	SKPD	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	570,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD	Jumlah Bahan Logistik	43 Jenis	240,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD	Jumlah Bahan Logistik	8272 Unit	340,000,000	Sesuai hasil Desk pagu indikatif menjadi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											340,000,000 dan penyesuaian target capaian
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah penggandaan	20 Jenis	130,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah penggandaan	80000 Lembar	30,000,000	Sesuai hasil Desk pagu indikatif menjadi 30,000,000 dan penyesuaian target capaian
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-undangan	2 Jenis	50,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-undangan	5500 Buku/exemplar	50,000,000	Sesuai hasil Desk penyesuaian target capaian
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah/perjalanan dinas	200 Kali	224,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah/perjalanan dinas	117 Kali	100,000,000	Sesuai hasil Desk pagu indikatif menjadi 100,000,000 dan penyesuaian target capaian
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SKPD	Jumlah Arsip yang ditata/diklola	12 Bulan	75,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SKPD	Jumlah Arsip yang ditata/diklola	100 Box	50,000,000	Sesuai hasil Desk pagu indikatif menjadi 50,000,000 dan penyesuaian target capaian
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	653,328,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	551,396,330	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD	Tersedianya jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran 12 Bulan	12 Bulan	653,328,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD	Tersedianya jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran 12 Bulan	120 Orang/Bulan	551,396,330	Sesuai hasil Desk pagu indikatif menjadi 551,396,330 dan penyesuaian target capaian
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	SKPD	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	100%	380,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	SKPD	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	100%	280,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintahan Daerah		Urusan Pemerintahan Daerah			Pemerintahan Daerah		Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD	- Jumlah mobil yang terpelihara 9 Unit - Jumlah motor yang terpelihara 13 Unit	9 Unit 13 Unit	340,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan	22 Unit	240,000,000	Sesuai hasil Desk pagu indikatif menjadi 240,000,000 dan penyesuaian target capaian
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah peralatan	25 Unit	40,000,000	Sesuai hasil Desk penyesuaian target capaian
II	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jawa Barat dan Kota Bekasi	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	30%	1,150,000,000	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jawa Barat dan Kota Bekasi	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	30%	3,050,000,000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jawa Barat dan Kota Bekasi	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Masyarakat Kota Bekasi	41,67 %	1,150,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jawa Barat dan Kota Bekasi	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Masyarakat Kota Bekasi	41,67 %	3,050,000,000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	Kota Bekasi	Jumlah Peserta Pemantapan Ideologi Bangsa dan Nilai-Nilai Pancasila	500 Orang	1,150,000,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	Kota Bekasi	Jumlah Peserta Pemantapan Ideologi Bangsa dan Nilai-Nilai Pancasila	70 Orang	3,050,000,000	Sesuai hasil Desk pagu indikatif menjadi 240,000,000 dan penyesuaian target capaian

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jawa Barat Kota Bekasi Kota Bekasi	Jumlah peserta Pembinaan Bela Negara Jumlah peserta konsepsi dasar kebangsaan Jumlah peserta penguatan ideologi pancasila dalam rangka mencegah radikalisme di Kota Bekasi	200 Orang 100 Orang 100 Orang		Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jawa Barat Kota Bekasi	Jumlah peserta Pembinaan Bela Negara Jumlah Peserta Wawasan Kebangsaan	85 Orang 3050 Orang		
III	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Kota Bekasi	Persentase peningkatan pembinaan politik daerah	5 %	2,218,321,000	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Kota Bekasi	Persentase peningkatan pembinaan politik daerah	5 %	2,568,321,000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Kota Bekasi	Jumlah penyelenggaraan pendidikan politik	3 Kegiatan	2,218,321,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	Kota Bekasi	Jumlah penyelenggaraan pendidikan politik	3 Kegiatan	2,568,321,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah partai politik yang mendapat bantuan keuangan	8 Partai Politik	1,668,321,000	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Partai Politik yang mendapatkan bantuan keuangan	8 Partai Politik	2.168.321.000	Bantuan Keuangan Partai Politik (Hibah)
							Kota Bekasi	Jumlah lembaga yang mendapat bantuan dana hibah	1 Lembaga		Hibah ke KPUD Kota Bekasi
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	Kota Bekasi	Jumlah Peserta Pembinaan Manajemen Parpol dan Ormas	70 Orang	550,000,000	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Kota Bekasi	Jumlah Peserta Pembinaan Manajemen Parpol dan Ormas	40 Orang	400,000,000	Sesuai hasil Desk pagu indikatif menjadi 400,000,000 dan penyesuaian target capaian
		Kota Bekasi	Jumlah peserta pendidikan politik bagi masyarakat	900 Orang			Kota Bekasi	Jumlah peserta pendidikan politik bagi masyarakat	600 Orang		
		Kota Bekasi	Jumlah Pengadaan Aplikasi	1 Paket			Kota Bekasi	Jumlah Pengadaan Aplikasi	1 Paket		Kegiatan ditiadakan (hasil desk)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
IV	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Bekasi	Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina	100 %	6,331,430,000	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Bekasi	Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina	100 %	5,525,000,000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Bekasi	Jumlah organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan tertib administrasi di Kota Bekasi	5 Ormas/LSM	6,331,430,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Bekasi	Jumlah organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan tertib administrasi di Kota Bekasi	5 Ormas/LSM	5,525,000,000	
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan/LSM yang mendapat Hibah	8 Ormas/LSM	6,031,430,000	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan/LSM yang mendapat Hibah	5 Ormas/LSM	5.325.000.000	Hibah Ormas/LSM (Penyesuaian hasil desk indikator berubah menjadi 5 Ormas/LSM dan Pagu Indikatif menjadi 5,325,000,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Peserta Sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 56 Tahun 2017	180 Orang	300,000,000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Peserta Sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 56 Tahun 2017	180 Orang	200,000,000	Sesuai hasil Desk pagu indikatif menjadi 200,000,000 dan penyesuaian target capaian
V	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kota Bekasi	Cakupan masyarakat yang mendapat pembinaan peningkatan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	0.17 %	850,000,000	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kota Bekasi	Cakupan masyarakat yang mendapat pembinaan peningkatan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	0.17 %	800,000,000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Bekasi	Jumlah Masyarakat yang mendapat Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kota Bekasi	15 Kegiatan	850,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Bekasi	Jumlah Masyarakat yang mendapat Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kota Bekasi	15 Kegiatan	800,000,000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	Kota Bekasi Kota Bekasi	Jumlah fasilitasi kegiatan Pencegahan Narkoba Jumlah peserta road show antara	2 Kegiatan 1200 Orang	850,000,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	Kota Bekasi Kota Bekasi	Jumlah pelaksanaan Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional Jumlah peserta road show antara	1 Kali 1200 Orang	800,000,000	Sesuai hasil Desk pagu indikatif menjadi 800,000,000 dan penyesuaian target capaian

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Pemerintah Kota Bekasi dengan Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Tokoh Pemuda dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan			Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Pemerintah Kota Bekasi dengan Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Tokoh Pemuda dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan			
VI	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kota Bekasi	Persentase penanganan konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan	100 %	1,000,000,000	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kota Bekasi	Persentase penanganan konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan	100 %	777,581,305	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Bekasi	Jumlah Monitoring Kewaspadaan Dini Daerah dan Pemantauan Orang Asing di Kota Bekasi	250 Pantauan	1,000,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Bekasi	Jumlah Monitoring Kewaspadaan Dini Daerah dan Pemantauan Orang Asing di Kota Bekasi	250 Pantauan	777,581,305	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,	Kota Bekasi	Jumlah data kewaspadaan dini daerah	12 Dokumen	1,000,000,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Kewaspadaan Dini Daerah	12 Bulan	777.581.305	Sesuai hasil Desk pagu indikatif menjadi 777,581,305 dan penyesuaian target capaian

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah sub kegiatan pemantauan dan pengawasan orang asing	3 Kegiatan		Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bekasi Kota Bekasi	Jumlah pelaksanaan Monitoring dan Pendataan Orang Asing Jumlah peserta Sosialisasi Orang Asing	3 Kegiatan 120 Orang		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam melakukan perumusan rencana program/kegiatan, Badan Kesbangpol selalu melibatkan *stakeholder* di dalam merumuskan perencanaan. Dari *stakeholder* tersebut akan terkumpul masukan dan aspirasi terkait perencanaan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam menjangkau aspirasi tersebut, Badan Kesbangpol memulai dari tahapan Musrenbang tingkat Kecamatan, kemudian melalui Forum SKPD, dan diakhiri dalam Forum Musrenbang Tingkat Kota Bekasi.

Dari forum-forum penjangkauan aspirasi/masukan tersebut, terdapat usulan dari masyarakat terkait pelaksanaan program/kegiatan SKPD. Usulan tersebut adalah:

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kota Bekasi

SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pangalengan, Jawa Barat, Kota Bekasi	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.050.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pangalengan, Jawa Barat, Kota Bekasi	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Masyarakat Kota Bekasi	3.050.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Bekasi	Jumlah peserta pemantapan ideologi bangsa dan nilai-nilai pancasila	3.050.000.000	
		Pangalengan, Jawa Barat	Jumlah peserta pembinaan bela negara		
		Kota Bekasi	Jumlah Peserta Wawasan Kebangsaan		
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kota Bekasi	Persentase peningkatan pembinaan politik daerah		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Bekasi	Jumlah penyelenggaraan pendidikan politik		
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah partai politik yang mendapat bantuan keuangan	2.168.321.000	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
		Kota Bekasi	Jumlah lembaga yang mendapat bantuan dana hibah		Hibah ke KPUD Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Peserta Pembinaan Manajemen Partai Politik	300.000.000	
		Kota Bekasi	Jumlah Peserta Pembinaan Pendidikan Politik		
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Bekasi	Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina	5.525.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Bekasi	Jumlah organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan tertib administrasi di Kota Bekasi	5.525.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapat Bantuan Dana Hibah	5.325.000.000	Hibah ke MUI, FKUB, FKDM, GMBI, FORKOCI
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Peserta Sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 56 Tahun 2017	200.000.000	
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kota Bekasi	Cakupan masyarakat yang mendapat pembinaan peningkatan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	800.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Bekasi	Jumlah Masyarakat yang mendapat Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kota Bekasi	800.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah pelaksanaan Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional	800.000.000	
		Kota Bekasi	Jumlah peserta road show antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Tokoh Pemuda dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan		
		Kota Bekasi	Jumlah peserta sosialisasi bahaya narkoba		
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kota Bekasi	Persentase penanganan konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan	777.581.305	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Bekasi	Jumlah Monitoring Kewaspadaan Dini Daerah dan Pemantauan Orang Asing di Kota Bekasi	777.581.305	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Kewaspadaan Dini Daerah	777.581.305	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah pelaksanaan Monitoring dan Pendataan Orang Asing		
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah peserta Sosialisasi Orang Asing		

(Sesuai dengan Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ke dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESBANGPOL KOTA BEKASI

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025 merupakan rencana pembangunan jangka menengah keempat dari 4 (empat) tahap RPJM yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJMN Ke-4 tahun 2020-2025 adalah kelanjutan RPJMN ketiga Tahun 2014-2019, dengan arah/isu utama sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN 2005-2025, yaitu: *“Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian”*. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 dimaksud, Pemerintah telah merumuskan Visi yaitu: *“Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”*. Untuk mencapai Visi tersebut, terdapat 3 (tiga) Misi yang diemban, yaitu:

1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera;
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi; dan
3. Memperkuat demokrasi keadilan di semua bidang.

Untuk melaksanakan 3 (tiga) misi di atas, Pemerintah Pusat menetapkan agenda untuk mendukung misi tersebut. Agenda tersebut antara lain:

- | | | |
|------------|---|---|
| Agenda I | : | Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat; |
| Agenda II | : | Perbaikan tata kelola pemerintahan; |
| Agenda III | : | Penegakan pilar demokrasi; |
| Agenda IV | : | Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; |
| Agenda V | : | Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. |

Dari kelima agenda tersebut, *pelaksanaan* urusan Kesatuan Bangsa dan Politik terfokus pada penegakan pilar demokrasi. Penegakan pilar demokrasi bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, yang didukung oleh situasi dan kondisi yang kondusif. Hal ini tertuang di dalam Renstra Kemendagri 2020-2024.

Dalam pelaksanaannya, penegakan pilar demokrasi difokuskan kepada:

1. Jumlah paket revisi undang-undang bidang politik, khususnya revisi terbatas terhadap UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;

2. Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi;
3. Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil;
4. Indeks Kebebasan Sipil;
5. Indeks Hak-Hak Politik;
6. Persentase kebijakan/peraturan perundangan yang dilaksanakan oleh Pemda dan para pemangku kepentingan;
7. Persentase forum dialog publik yang efektif; serta
8. Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan terkait dengan 4 pilar negara (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI).

Kebijakan yang telah digariskan Menteri Dalam Negeri RI melalui Renstra Kemendagri tersebut kemudian dijabarkan lebih teknis oleh Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik. Oleh karenanya, untuk melihat arah kebijakan nasional pada bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan melakukan telaahan kebijakan Direktorat Jenderal Kesbangpol Kemendagri RI dan kebijakan Badan Kesbangpol Prov. Jawa Barat. Telaahan bermaksud untuk melakukan analisa kemampuan Badan Kesbangpol Kota Bekasi di dalam menjawab tantangan isu di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkembang di tataran pusat maupun provinsi. Telaahan ini juga disertai analisa faktor penghambat dan pendorong pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi dihubungkan dengan kebijakan prioritas yang dikeluarkan Ditjen Kesbangpol dan Badan Kesbangpol Prov. Jawa Barat. Telaahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol Kota Bekasi Berdasarkan Sasaran Renstra K/L dan Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Dalam Pelayanan

No	Indikator Kinerja dan Sasaran Jangka Menengah Kemendagri dan Bakesbangpol Prov. Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan pada Bakesbangpol Kota Bekasi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Indikator Kinerja Ditjen Kesbangpol Kemendagri: Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat			
	1)Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> • Data base keberadaan/ domisili organisasi kemasyarakatan di Kota Bekasi belum terkonsolidasi dengan baik; • Anggota-anggota organisasi kemasyarakatan yang telah mendapatkan pelatihan tidak 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota organisasi kemasyarakatan kurang disiplin di dalam mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk meningkatkan kapasitas organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Bekasi.

No	Indikator Kinerja dan Sasaran Jangka Menengah Kemendagri dan Bakesbangpol Prov. Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan pada Bakesbangpol Kota Bekasi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
		melakukan transfer pengetahuan kepada anggotanya		
Indikator Kinerja Ditjen Kesbangpol Kemendagri: Bidang Politik Dalam Negeri				
	2) Persentase laporan pemantauan dan pelaporan perkembangan politik yang tepat waktu	Kurangnya pendidikan dasar bagi aparatur Kesbangpol terkait metode penyusunan laporan pemantauan perkembangan politik yang sedang berkembang	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya penjelasan mengenai indikator-indikator politik yang harus dilaporkan dari objek pantauan 	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk memberikan laporan pantauan terkait perkembangan politik yang terjadi di Kota Bekasi
	3) Jumlah Partai Politik yang mendapatkan Bantuan Keuangan	Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Partai Politik terkait informasi tata cara pemberian Bantuan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Keterlambatan Partai Politik di dalam menyelesaikan SPJ Bantuan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk melakukan verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang berhak menerima Bantuan Keuangan
Indikator Kinerja Ditjen Kesbangpol Kemendagri: Bidang Kewaspadaan Nasional				
	4) Jumlah Pemantauan Situasi Daerah	Adanya instansi lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama di dalam melakukan pemantauan situasi daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya sarana dan prasarana serta aparatur di dalam menunjang kegiatan pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk melakukan pemantauan terkait situasi dan eskalasi yang terjadi di daerah
	5) Jumlah aparatur Pemda yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan bidang Kewaspadaan Nasional	Minimnya aparatur Kesbangpol Kota Bekasi yang mendapatkan Diklat mengenai Kewaspadaan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya anggaran yang mendukung adanya Diklat Kewaspadaan Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk melakukan pembinaan kepada aparatur terkait Kewaspadaan Nasional
Indikator Kinerja Ditjen Kesbangpol Kemendagri: Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan				

No	Indikator Kinerja dan Sasaran Jangka Menengah Kemendagri dan Bakesbangpol Prov. Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan pada Bakesbangpol Kota Bekasi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
	1) Jumlah kerja sama dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Belum tersedianya ketentuan/ metode baku terkait materi dan pola kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam membangun wawasan kebangsaan di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya keinginan masyarakat di dalam mengkaji wawasan kebangsaan dan ideologi Negara, terutama dari kalangan pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk menjalin kerjasama yang intensif dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka membangun ideologi dan wawasan kebangsaan di masyarakat
	2) Jumlah penguatan forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan dan aparatur pemerintah	Belum tersedianya materi/ bahan ajar baku yang membahas nilai-nilai kebangsaan bagi pemuda, perempuan dan aparatur pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya keinginan pemuda, perempuan dan aparatur pemerintah di dalam mengkaji nilai-nilai kebangsaan demi terciptanya wawasan kebangsaan 	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk melakukan penguatan forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan dan aparatur pemerintahan
2	Indikator Kinerja Bakesbangpol Prov. Jawa Barat: Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat			
	Sasaran Jangka Menengah: 1) Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu;	Adanya instansi lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama di dalam peningkatan partisipasi masyarakat di Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol Kota Bekasi tidak memiliki payung hukum untuk melakukan sosialisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk menjamin ketertiban dan keamanan selama proses Pemilu
	2) Tingkat Penyelenggaraan Pendidikan Politik;	Adanya perbedaan pemahaman dan cara pandang dari sebagian aktifis organisasi yang berada di Kota Bekasi di dalam melakukan pemaknaan proses politik	<ul style="list-style-type: none"> Data domisili dari organisasi kemasyarakatan atau perwakilan kelompok lainnya sering berubah tanpa ada pemberitahuan 	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol Kota Bekasi, berdasarkan tupoksi mempunyai kewajiban untuk memperkuat kelembagaan demokrasi yang ada di Kota Bekasi serta meningkatkan

No	Indikator Kinerja dan Sasaran Jangka Menengah Kemendagri dan Bakesbangpol Prov. Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan pada Bakesbangpol Kota Bekasi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
				pemahaman politik masyarakat Kota Bekasi
	3)Tingkat Peran Serta Masyarakat Madani (Civil Society) dalam Pembangunan Politik;	Belum ada payung hukum yang secara terperinci mengatur keterlibatan masyarakat beserta batasannya di dalam Pembangunan Politik di Kota Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat oknum dari Orkemas atau aktifis di Kota Bekasi yang menggunakan dalil peran serta masyarakat atau keterbukaan publik melakukan tindakan penyidikan yang bukan wewenang dari organisasi tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesbangpol Kota Bekasi, berdasarkan tupoksi mempunyai kewajiban untuk memperkuat keterlibatan masyarakat di dalam Pembangunan Politik di Kota Bekasi dengan cara menanamkan nilai-nilai politik yang santun dan beretika
	4)Tingkat Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Pemerintah Pusat maupun Provinsi belum menyediakan modul/ garis-garis besar Wawasan Kebangsaan terkait kondisi Indonesia saat ini	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya keinginan dari masyarakat untuk memahami Wawasan Kebangsaan, terutama dari kalangan remaja/ pemula 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesbangpol Kota Bekasi, berdasarkan tupoksi mempunyai kewajiban untuk menanamkan nilai dan ideologi Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat, terutama kalangan masyarakat pemula/remaja

3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol

Oleh karena itu, tujuan dan sasaran dari Badan Kesbangpol dalam periode 2018-2023 harus disesuaikan dengan misi dan program prioritas yang dimaksud sesuai dengan rencana strategis perubahan. Adapun tujuan Badan Kesbangpol adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
2. Mewujudkan, kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi;

Adapun sasaran Sasaran adalah prediksi hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur

dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi adalah:

- 1) Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.
- 2) Terwujudnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan;
- 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi;
- 4) Meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan;

Dari sasaran tersebut kemudian ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran yang berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan kinerja tujuan.

Sasaran-sasaran yang ada kemudian dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk program anggaran/ kegiatan. Untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah terpilih Badan Kesbangpol Kota Bekasi menyediakan beberapa program, yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini diukur dengan menggunakan Persentase Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Persentase Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Persentase Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan Persentase Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;

2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Program ini diukur dengan menggunakan Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;

3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Program ini diukur dengan menggunakan Persentase Pembinaan Politik Daerah;

4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Program ini diukur dengan menggunakan Persentase jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dibina;

5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Program ini diukur dengan menggunakan Cakupan masyarakat yang mendapat pembinaan peningkatan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Program ini diukur dengan menggunakan Persentase penanganan konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan misi Walikota Bekasi yang ke 5 :

Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman, maka perlu dilakukan upaya untuk mencapai misi tersebut. Upaya-upaya yang akan dilakukan antara lain:

- 1) Penguatan fungsi kesatuan bangsa di masyarakat Kota Bekasi demi terciptanya keadaan tenggang rasa terhadap kearifan budaya dan sosial budaya yang multikultur;
- 2) Penguatan fungsi bela negara di masyarakat Kota Bekasi untuk mewujudkan ketahanan sosial masyarakat di dalam menghadapi era globalisasi;
- 3) Penguatan fungsi wawasan kebangsaan di masyarakat Kota Bekasi demi mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi;
- 4) Penguatan fungsi kewaspadaan dini di masyarakat Kota Bekasi;
- 5) Penguatan fungsi pendidikan politik untuk masyarakat Kota Bekasi; dan
- 6) Penguatan fungsi pengawasan dan pencegahan terkait peredaran Narkoba di Kota Bekasi.

Misi pembangunan yang dicanangkan Walikota terpilih yang memiliki keterkaitan dengan tupoksi Badan Kesbangpol adalah:

- 1) Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Misi ini memiliki tujuan untuk menciptakan Kota Bekasi sebagai kota yang memiliki tingkat stabilitas dan kondusifitas yang tinggi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan prioritas Kepala Daerah terpilih, Badan Kesbangpol Kota Bekasi melakukan perencanaan program dan kegiatan berdasarkan Renstra SKPD. Pada tahun 2022 ini Badan Kesbangpol Kota Bekasi melakukan penguatan Kesatuan Bangsa dan Wawasan Kebangsaan serta penguatan fungsi deteksi dini agar tidak menyebabkan konflik SARA di masyarakat. Badan Kesbangpol juga melakukan pendidikan politik ke seluruh lapisan masyarakat di Kota Bekasi serta memberikan pembinaan kepada Organisasi Kemasyarakatan Kota Bekasi. Untuk menjaga kantrantibmas dan menekan angka kerawanan sosial di Kota Bekasi, Badan Kesbangpol bekerja sama dengan instansi terkait melakukan giat deteksi dini, kewaspadaan dini masyarakat dan pemantauan lingkungan secara rutin.

Untuk mendukung upaya yang telah disebutkan di atas, Badan Kesbangpol menyiapkan pembiayaan upaya tersebut dalam wujud rincian program dan kegiatan Badan Kesbangpol yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022. Rincian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belanja Langsung Non Urusan

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 1 laporan (Renstra, Proker, Renja, RKT, LKPJ dan LKIP). Hasil yang didapat adalah meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 9.090.250.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianya Pembayaran gaji, tunjangan dan premi BPJS ASN.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun sebanyak 1 laporan. Hasil yang didapat adalah meningkatnya sistem pelaporan keuangan SKPD.

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianya biaya pendidikan dan pelatihan formal aparatur selama 12 bulan. Hasil yang didapat adalah meningkatnya kapasitas dan sumber daya aparatur. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah pengembangan kompetensi ASN dalam bentuk Sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hasil yang didapat adalah meningkatnya kapasitas dan sumber daya aparatur. Kegiatan ini untuk mendukung pengembangan kompetensi SDM aparatur Badan Kesbangpol Kota Bekasi.
- **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**
 - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah pengembangan kompetensi ASN dalam bentuk Bimbingan Teknis terhadap implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Hasil yang didapat adalah meningkatnya kapasitas dan sumber daya aparatur. Kegiatan ini untuk mendukung pengembangan kompetensi SDM aparatur Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**
 - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 340.000.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terlaksananya layanan alat tulis kantor sebanyak 8272 Unit. Hasil yang didapat adalah tersedianya layanan alat tulis kantor selama 12 bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.
- **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**
 - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terlaksananya layanan cetakan dan penggandaan sebanyak 80.000 Lembar untuk 12 bulan. Hasil yang didapat adalah tersedianya layanan cetakan dan penggandaan selama 12 bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.
- **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**
 - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 5.500 Buku/eksemplar selama 1 tahun. Hasil yang didapat adalah tercukupinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta makanan dan minuman Rapat sebanyak 117 kali selama 1 tahun. Hasil yang didapat adalah terlaksananya aktifitas kantor. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

- **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000 dengan keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah penataan arsip pada Badan Kesbangpol. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.551.396.330. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianya honor Tenaga Kerja Kontrak (TKK) untuk 10 Orang (120 Orang/bulan) untuk 12 Bulan. Hasil yang didapat adalah terlaksananya administrasi perkantoran dengan baik. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 240.000.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sebanyak (22 Jenis) 9 unit roda empat dan 13 unit roda dua. Hasil yang didapat adalah tersedianya pemeliharaan kendaran dinas. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terpeliharanya

peralatan gedung kantor sebanyak 25 Unit untuk 12 Bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

2. Belanja Langsung Urusan SKPD

a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.050.000.000 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah peserta pembinaan konsepsi dasar kebangsaan sebanyak 70 Orang. Kegiatan ini memiliki kelompok sasaran yang berasal dari kalangan pemerintah, Ormas, Orpol, Akademisi, dan Pelajar se-Kota Bekasi. Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terselesaikannya permasalahan wawasan kebangsaan di Kota Bekasi.
- Jumlah peserta pembinaan bela negara sebanyak 85 Orang. Adapun hasil yang didapat adalah terlaksannya bela negara di Kota Bekasi. Sasaran dari kegiatan ini pelajar SMA/SMK sederajat se-Kota Bekasi. Model pembinaan dengan melaksanakan pendidikan kesemaptaan di Rindam Siliwangi.
- Jumlah peserta Peserta Wawasan Kebangsaan sebanyak 3050 Orang. Adapun hasil yang didapat adalah Tertanamnya Nilai-Nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat di Kota Bekasi. Sasaran dari kegiatan ini warga masyarakat Kota Bekasi.

b) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.

✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.168.321.000 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah partai politik yang mendapat bantuan keuangan yang mendapat kursi di DPRD Kota Bekasi. Adapun hasil yang didapat adalah terfasilitasinya pemberian bantuan keuangan bagi partai politik di Kota Bekasi.
- Jumlah Lembaga yang mendapat Bantuan Dana Hibah. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini terfasilitasi operasional lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi.

- Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 400.000.000 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik sebanyak 600 orang. Adapun Hasil yang didapat adalah terlaksananya pendidikan politik di Kota Bekasi. Kegiatan ini direncanakan tersebar se-Kota Bekasi dengan melaksanakan pendidikan *on the spot* di sekolah-sekolah. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa SMA/SMK sederajat.
- Jumlah Peserta Pembinaan Manajemen Parpol dan Ormas sebanyak 40 orang. Adapun Hasil yang didapat adalah tertib administrasi dalam pertanggungjawaban bantuan keuangan dan hibah bagi Parpol dan Ormas di Kota Bekasi. Sasaran dari kegiatan ini adalah Pengurus Partai Politik dan Pengurus Ormas di Kota Bekasi.

c) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.325.000.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini berupa Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapat Bantuan Dana Hibah. Adapun hasil yang didapat adalah terfasilitasinya hibah sebanyak 5 Ormas/LSM di Kota Bekasi.

- Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 200.000.000. Dilihat dari jumlah Organisasi Kemasyarakatan/LSM yang begitu kompleks dari berbagai bidang sudah kewajiban pemerintah daerah melalui Bakesbangpol memfasilitasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 sebanyak 180 peserta. Hasil yang didapat adalah terciptanya Tertib Administrasi Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bekasi.

d) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 800.000.000 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :
 - Jumlah fasilitasi pencegahan narkoba sebanyak 2 kegiatan. Adapun hasil yang didapat adalah terfasilitasinya pencegahan

narkoba di Kota Bekasi. Besaran pagu untuk keluaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000.

- Jumlah peserta road show antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Tokoh Pemuda dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan sebanyak 1200 orang. Adapun hasil yang didapat adalah bersinerginya pemerintah daerah bersama dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Bekasi. Besaran pagu untuk keluaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 600.000.000.

e) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- **Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 777.581.305 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :
 - Jumlah pelaksanaan Monitoring dan Pendataan Orang Asing. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah Terpantau dan terverifikasinya administrasi orang asing di Kota Bekasi. Hasil yang didapat adalah terlaksananya pemantauan Kantrantibmas secara rutin di Kota Bekasi.
 - Jumlah Laporan Hasil Kewaspadaan Dini Daerah. Adapun hasil yang didapat yaitu fasilitasi penyelenggaraan Tim kewaspadaan dini daerah selama 12 Bulan dan terlaksananya kewaspadaan dini daerah di Kota Bekasi. Fokus kegiatan ini adalah melakukan deteksi dini dan pemetaan keamanan wilayah Kota Bekasi.

TABEL 3.2

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

Nama SKPD: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub.Kegiatan)	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jawa Barat dan Kota Bekasi	100%	10.846.646.330	APBD Kota Bekasi	-	100%	11.086.646.330
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	15.000.0000	APBD Kota Bekasi	-	100%	30.000.000

KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub.Kegiatan)	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	Kota Bekasi	1 Laporan	15.000.000	APBD Kota Bekasi	-	1 Laporan	30.000.000
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	9.100.250.000	APBD Kota Bekasi, Dana Alokasi Umum (DAU)	-	100%	9.100.250.000
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji, tunjangan dan premi BPJS ASN	Kota Bekasi	602 Orang	9.090.250.000	APBD Kota Bekasi	-	602 Orang	9.090.250.000
		Jumlah Pembayaran Tunjangan ASN		516 Orang				516 Orang	
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	Kota Bekasi	1 Laporan	10.000.000	APBD Kota Bekasi	-	1 Laporan	30.000.000
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jawa Barat dan Kota Bekasi	100%	330.000.0000	APBD Kota Bekasi	-	100%	330.000.000
8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya biaya pendidikan dan pelatihan formal	Kota Bekasi	5 Orang	30.000.000	APBD Kota Bekasi	Pengembangan Kompetensi ASN	12 Orang	30.000.000
8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan	Jawa Barat	37 Orang	100.000.000	APBD Kota Bekasi	Pengembangan	55 Orang	-

KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub.Kegiatan)	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Perundang-Undangan					Kompetensi ASN		
8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jawa Barat	55 Orang	200.000.000	APBD Kota Bekasi	Pengembangan Kompetensi ASN	55 Orang	-
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	570.000.000	APBD Kota Bekasi	-	100%	695.00.000
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	Kota Bekasi	8272 Unit	340.000.000	APBD Kota Bekasi	-	8272 Unit	340.000.000
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	Kota Bekasi	80000 Lembar	30.000.000	APBD Kota Bekasi	-	80000 Lembar	30.000.000
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-undangan	Kota Bekasi	5500 Buku/exemplar	50.000.000	APBD Kota Bekasi	-	5500 Buku/exemplar	50.000.000
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah/perjalanan dinas	Kota Bekasi	117 Kali	100.000.000	APBD Kota Bekasi	-	200 kali	200.000.000

KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub.Kegiatan)	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang ditata/diklola	Kota Bekasi	100 Box	50.000.000	APBD Kota Bekasi	-	200 Box	75.000.000
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	100%	551.396.330	APBD Kota Bekasi	-	100%	551.396.330
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor	Kota Bekasi	120 Orang/Bulan	551.396.330	APBD Kota Bekasi	-	120 Orang/Bulan	551.396.330
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	100%	280.000.000	APBD Kota Bekasi	-	100%	380.000.000
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi	22 Unit	240.000.000	APBD Kota Bekasi	-	22 Unit	340.000.000
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan	Kota Bekasi	25 Unit	40.000.000	APBD Kota Bekasi	-	25 Unit	40.000.000
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jawa Barat dan Kota Bekasi	30%	3.050.000.000	APBD Kota Bekasi	-	50%	3.050.000.000

KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub.Kegiatan)	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Masyarakat Kota Bekasi	Jawa Barat dan Kota Bekasi	41,67 %	3.050.000.000	APBD Kota Bekasi	-	70,83 %	3.050.000.000
01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta pemantapan ideologi bangsa dan nilai-nilai pancasila	Kota Bekasi	70 Orang	3.050.000.000	APBD Kota Bekasi	-	70 Orang	3.050.000.000
		Jumlah peserta pembinaan bela negara	Jawa Barat dan Kota Bekasi	85 Orang				85 Orang	
		Jumlah Peserta Wawasan Kebangsaan	Kota Bekasi	3050 Orang				3050 Orang	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan pembinaan politik daerah	Kota Bekasi	5 %	2.568.321.000	APBD Kota Bekasi	2.568.321.000	5 %	2.568.321.000
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah penyelenggaraan pendidikan politik	Kota Bekasi	3 Kegiatan	2.568.321.000	APBD Kota Bekasi	2.568.321.000	3 Kegiatan	2.568.321.000

KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub.Kegiatan)	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah partai politik yang mendapat bantuan keuangan	Kota Bekasi	8 Partai Politik	2.168.321.000	APBD Kota Bekasi	(Bantuan Keuangan Partai Politik yang mendapat Kursi di DPRD)	8 Partai Politik	2.168.321.000
		Jumlah lembaga yang mendapat bantuan dana hibah	Kota Bekasi	1 Lembaga			(Bantuan Dana Hibah Lembaga KPU Kota Bekasi)	1 Lembaga	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Peserta Pembinaan Manajemen Partai Politik	Kota Bekasi	40 Orang	400.000.000	APBD Kota Bekasi	-	40 Orang	400.000.000
		Jumlah Peserta Pembinaan Pendidikan Politik		600 Orang				600 Orang	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina	Kota Bekasi	100 %	5.525.000.000	APBD Kota Bekasi	-	100 %	5.525.000.000
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan tertib administrasi di Kota Bekasi	Kota Bekasi	5 Ormas/LSM	5.525.000.000	APBD Kota Bekasi	-	10 Ormas/LSM	5.525.000.000

KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub.Kegiatan)	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapat Bantuan Dana Hibah	Kota Bekasi	5 Ormas/LSM	5.325.000.000	APBD Kota Bekasi	Hibah bagi Ormas/LSM : - MUI - FKUB - FKDM - GMBI - FORKOCI	10 Ormas/LSM	5.325.000.000
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 56 Tahun 2017	Kota Bekasi	180 Orang	200.000.000	APBD Kota Bekasi	-	180 Orang	400.000.000
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan masyarakat yang mendapat pembinaan peningkatan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Kota Bekasi	0.17 %	800.000.000	APBD Kota Bekasi	-	0.18 %	800.000.000
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Masyarakat yang mendapat Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kota Bekasi	Kota Bekasi	15 Kegiatan	800.000.000	APBD Kota Bekasi	-	15 Kegiatan	800.000.000

KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub.Kegiatan)	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah pelaksanaan Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional	Kota Bekasi	1 Kali	200.000.000	APBD Kota Bekasi	-	1 Kali	250.000.000
		Jumlah peserta road show antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Tokoh Pemuda dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan	Kota Bekasi	1200 Orang	600.000.000	APBD Kota Bekasi	-	1200 Orang	600.000.000
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan	Kota Bekasi	100 %	777.581.305	APBD Kota Bekasi	-	100 %	800.000.000
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Monitoring Kewaspadaan Dini Daerah dan Pemantauan Orang Asing di Kota Bekasi	Kota Bekasi	250 Pantauan	777.581.305	APBD Kota Bekasi	-	250 Pantauan	800.000.000
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	Jumlah Laporan Hasil Kewaspadaan Dini Daerah	Kota Bekasi	12 Bulan	777.581.305		-	3 Kegiatan	800.000.000

KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub.Kegiatan)	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah pelaksanaan Monitoring dan Pendataan Orang Asing		3 Kegiatan		APBD Kota Bekasi			
		Jumlah peserta Sosialisasi Orang Asing		120 Orang					

BAB IV**RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2022**

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Penyusunan RENJA-PD berpedoman pada RENSTRA Badan Kesbangpol Kota Bekasi dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan RENJA-PD bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. RENJA-PD yang disusun ini merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Adapun rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022 ini dengan program dan kegiatan serta pagu indikatif mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2021-2023.

Rencana program dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2022 mencakup dari 6 Program, 11 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan. Alokasi Belanja pada Pagu Indikatif Renja Murni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2022 sebesar Rp. 23.567.548.635,- dan Alokasi Belanja pada Pagu Indikatif Renja Perubahan sebesar Rp. 24.667.548.635,-. Adapun Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 antara lain dapat dilihat sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1. berikut.

Tabel 4.1
Rencana Kerja Perubahan
(Program, Kegiatan, Indikator Program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													23.567.548.635	24.667.548.635	
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													10.846.646.330	10.846.646.330	
8	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													15.000.000	15.000.000	
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan	Terpenuhinya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
8	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													9.100.250.000	9.100.250.000	
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Pembayaran Gaji ASN dan Premi BPJS	Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100 %	100 %	602 Orang	602 Orang	100 %	100 %	9.090.250.000	9.090.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
						Jumlah Pembayaran Tunjangan ASN					516 orang	516 orang			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
8	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan	Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	10.000.000	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
8	01	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													330.000.000	330.000.000	
8	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100 %	100 %	12 Orang	12 Orang	100 %	100 %	30.000.000	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Setelah		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
8	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peserta	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	55 orang	55 orang	100 %	100 %	100.000.000	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
8	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peserta	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	55 orang	55 orang	100 %	100 %	200.000.000	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
8	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										570.000.000	570.000.000			
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Bahan Logistik	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100 %	100 %	8272 Unit	8272 Unit	100 %	100 %	340.000.000	340.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Penggandaan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100 %	100 %	80000 Lembar	80000 Lembar	100 %	100 %	30.000.000	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
8	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah bahan bacaan/ peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100 %	100 %	5500 Buku/exemplar	5500 Buku/exemplar	100 %	100 %	50.000.000	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah/perjalanan dinas	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100 %	100 %	117 Kali	117 Kali	100 %	100 %	100.000.000	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
8	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Arsip yang ditata/dikelola	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100 %	100 %	100 Box	100 Box	100 %	100 %	50.000.000	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
8	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										551.396.330	551.396.330			
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100 %	100 %	144 Orang/Bulan	144 Orang/Bulan	100 %	100 %	551.396.330	551.396.330	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
8	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										280.000.000	280.000.000			
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100 %	100 %	22 Unit	22 Unit	100 %	100 %	240.000.000	240.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Setelah	Sebelum	Setelah
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
							Pemerintah Daerah														
8	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Peralatan	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100 %	100 %	25 Unit	25 Unit	100 %	100 %	40.000.000	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
8	1	2			PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN										3.050.000.000	3.250.000.000					
8	01	002	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan										3.050.000.000	3.250.000.000					
8	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta pemantapan ideologi bangsa dan nilai-nilai pancasila Jumlah peserta pembinaan bela negara Jumlah Peserta Wawasan Kebangsaan Jumlah peserta penguatan ideologi pancasila melalui tema kebangsaan	Terwujudnya pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 %	70 Orang 85 Orang 3050 Orang	70 Orang 85 Orang 3050 Orang	100 %	100 %	3.050.000.000	3.250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dalam Perubahan Anggaran Belanja (ABT) Sub Kegiatan ini mengajukan penambahan pagu anggaran sebesar Rp 200.000.0000 (Diperuntukan untuk pelaksanaan penguatan ideologi pancasila melalui tema kebangsaan)		
8	1	3			PROGRAM Peningkatan PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK										2.568.321.000	3.218.321.000					
8	01	003	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										2.568.321.000	3.218.321.000					
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Persentase Pembinaan Politik Daerah	Jumlah lembaga yang mendapat bantuan dana hibah	Peningkatan kesadaran politik masyarakat	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	5 %	1 Lembaga	2 Lembaga	100 %	100 %	2.168.321.000	2.818.321.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dalam Perubahan Anggaran Belanja (ABT) Sub Kegiatan ini mengajukan penambahan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana					
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
							Jumlah partai politik yang mendapat bantuan keuangan																pagu anggaran sebesar Rp 650.000.0000 (Diperuntukan untuk Hibah kepada Lembaga BAWASLU Kota Bekasi Rp 400.000.000 dan KPU Kota Bekasi Rp 250.000.000)
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pembinaan Politik Daerah	Jumlah Peserta Pembinaan Manajemen Partai Politik Jumlah Peserta Pembinaan Pendidikan Politik	Peningkatan kesadaran politik masyarakat	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	5 %	40 Orang 600 Orang	40 Orang 600 Orang	100 %	100 %	400.000.000	400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN													5.525.000.000	5.775.000.000						
8	01	004	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematangan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat													5.525.000.000	5.775.000.000					
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapat Bantuan Dana Hibah	Persentase partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam pembangunan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Ormas/L SM	6 Ormas/LSM	100 %	100 %	5.325.000.000	5.575.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dalam Perubahan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Sub Kegiatan ini mengajukan penambahan pagu anggaran sebesar Rp 250.000.0000 (Diperuntukan untuk Hibah Organisasi FPK Kota Bekasi)				
8	1	4	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina	Jumlah Peserta Sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 56 Tahun 2017	Persentase partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam pembangunan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	180 peserta	180 peserta	100 %	100 %	200.000.000	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA													800.000.000	800.000.000						

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Setelah		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
8	01	005	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya										800.000.000	800.000.000			
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Cakupan Masyarakat yang mendapat pembinaan peningkatan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya	Jumlah pelaksanaan Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional Jumlah peserta road show antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Tokoh Pemuda dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Jumlah peserta sosialisasi bahaya narkoba	Terwujudnya stabilitas kerukunan umat beragama dan penurunan kasus penyalahgunaan Narkotika di Kota Bekasi	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,17 %	0,17 %	1 kali 1200 orang 150 orang	1 kali 1200 orang 150 orang	100 % 100 %	100 % 100 %	800.000.000	800.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL										777.581.305	777.581.305				
8	01	006	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pematapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial										777.581.305	777.581.305			
8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase penanganan konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan	Jumlah Laporan Hasil Kewaspadaan Dini Daerah Jumlah pelaksanaan Monitoring dan Pendataan Orang Asing Jumlah peserta Sosialisasi Orang Asing	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Kota Bekasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan 3 Kegiatan 120 Orang	12 Laporan 3 Kegiatan 120 Orang	100 % 100 %	100 % 100 %	777.581.305	777.581.305	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
TOTAL												23.567.548.635	24.667.548.635					

BAB V

PENUTUP

A. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Penetapan program dan kegiatan yang ada di dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam melakukan perumusan Renja, kebijakan yang tertuang di dalam RPJMD Kota Bekasi dan Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi dijadikan rujukan utama di dalam proses penyusunan. Prinsip yang digunakan dalam penyusunan Renja Perubahan ini adalah prinsip efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabel.

Inti dari penyusunan Renja Perubahan ini adalah optimalisasi pencapaian hasil dari upaya Perangkat Daerah per tahun anggaran. Selain itu, Renja Perubahan mempunyai posisi penting di dalam menciptakan keterpaduan dan sinkronasi antar kegiatan yang ada di dalam satu program, maupun kegiatan-kegiatan yang berlainan program. Oleh karenanya, untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, diperlukan *sharing* informasi dari Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah. Melalui penyusunan Renja lah *sharing* informasi itu dapat dilaksanakan.

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada tahun berjalan terdapat kendala, baik dalam proses pelaksanaan fisik dan anggaran, maka akan dilakukan penyesuaian dokumen perencanaan kerja. Penyesuaian tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan yang terlebih dahulu dilakukan proses keselarasan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan.

B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesbangpol merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dilaksanakan selama tahun 2022. Untuk menyusun Renja Badan Kesbangpol Kota Bekasi ini setiap tahapan perencanaan pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan. Dimulai dari penjaringan usulan yang berasal dari Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan hingga Forum Musrenbang Tingkat Kota Bekasi. Pada setiap tahapan perencanaan yang dijalani, memungkinkan terjadinya kesalahan maupun distorsi maksud atau tujuan dari usulan. Oleh karena

itu, apabila terjadi perubahan kebijakan daerah maupun kebijakan nasional selama tahun 2022, Badan Kesbangpol Kota Bekasi akan melakukan perubahan-perubahan demi kesempurnaan Renja ini.

C. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu meningkatkan pemahaman dan penguatan fungsi deteksi dini dari setiap aparatur Badan Kesbangpol. Hal ini diperlukan untuk melakukan analisa kerawanan sosial yang terjadi di masyarakat, baik itu tahapan preventif maupun rehabilitasi;
2. Perlu meningkatkan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan rasa solidaritas dan tenggang rasa di masyarakat Kota Bekasi;
3. Aparatur Badan Kesbangpol yang ada saat ini dari sisi kualitas masih kurang, sehingga akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan penambahan jumlah pegawai;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat di dalam proses pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Demikian Rencana kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 ini disusun, kiranya benar-benar menjadi acuan dalam menjalankan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun anggaran 2022.

Bekasi, 2022
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA BEKASI



CECEP SUHERLAN, SE
 PEMPINA UTAMA MUDA
 NIP. 19630328 198503 1 009